

Analisis Praktik Inklusi Di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto Berbasis Indeks Inklusi

Eva Athifah¹, Muhamad Ihsan Khuluki², Laeli Anggraeni³, Najwa Kamila⁴,
Fauziyah Zalfa⁵

^{1,2,3,4,5}Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

¹244110401087@mhs.uinsaizu.ac.id ²244110401099@mhs.uinsaizu.ac.id

³244110401095@mhs.uinsaizu.ac.id ⁴244110401103@mhs.uinsaizu.ac.id

⁵244110401089@mhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah dasar. Permasalahan akademik dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi indeks inklusi di SDN 1 Tanjung ditinjau dari dimensi budaya, kebijakan, dan praktik inklusi. Penelitian menggunakan Metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah Manager Inklusi SDN 1 Tanjung yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 1 Tanjung telah memenuhi tiga dimensi utama dalam *Index for Inclusion*, yaitu budaya inklusif, kebijakan inklusif, dan praktik inklusif. Sekolah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang ramah, toleran, dan tidak diskriminatif bagi siswa reguler maupun ABK. Selain itu, sekolah memiliki legalitas resmi, program pendukung, Guru Pendamping Khusus (GPK), serta pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan fasilitas, kurangnya jumlah GPK, dan perlunya peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi.

Keywords: pendidikan inklusif, indeks inklusi, anak berkebutuhan khusus, sekolah dasar, pembelajaran inklusif.

ABSTRAK

This study was motivated by the importance of implementing inclusive education as a means of fulfilling the right to education for children with special needs (CWSN) in elementary schools. The research question in this study is how the inclusion index is implemented at SDN 1 Tanjung, as viewed from the dimensions of culture, policy, and inclusive practices. The study employed a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The research subject is the Inclusion Manager at SDN 1 Tanjung, who plays a strategic role in managing inclusive education at the school. The results indicate that SDN 1 Tanjung has met the three main dimensions of the Index for Inclusion: inclusive culture, inclusive policies, and inclusive practices. The school has successfully created a learning environment that is welcoming, tolerant, and

non-discriminatory for both regular students and students with special needs. Additionally, the school possesses official legal status, support programs, Special Education Teachers (SETs), and instruction tailored to students' needs. However, challenges remain, including limited facilities, a shortage of SETs, and the need to enhance teachers' competencies in differentiated instruction.

Keywords: *inclusive education, Inclusion Index, students with special needs, elementary school, inclusive learning.*

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 mengenai hak memperoleh pendidikan bermutu . Peran pemerintah sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang merata, namun selama ini keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) masih dianggap sebagai tembok yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya sehingga menghambat interaksi sosial . Oleh karena itu, sekolah inklusif hadir sebagai wujud pendidikan tanpa diskriminasi di mana anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. (Ahmadi, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penyediaan layanan

pendidikan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus melalui sekolah inklusi yang menyesuaikan sistem pembelajaran, fasilitas, dan peran guru sebagai pemberi motivasi. Sekolah inklusi didefinisikan sebagai sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan namun memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Meski demikian, penyelenggaraan sekolah ini menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah ketidaksiapan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. (Candra, 2016)

Pada kondisi saat ini, banyak sekolah yang mengaku sebagai sekolah inklusi namun belum memahami sepenuhnya konsep dasar implementasinya, mulai dari kesalahan identifikasi peserta didik hingga kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum dan pengelolaan kelas. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya sosialisasi seringkali masih

memicu diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebagai solusi, diperlukan instrumen Index for Inclusion untuk mengevaluasi sekolah dari segi budaya, kebijakan, dan praktik guna mengembangkan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai inklusif dan menghilangkan praktik diskriminatif. (Jauhari, 2017)

Pemilihan SDN 1 Tanjung yang berlokasi di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang telah menerapkan pendidikan inklusi sejak tahun pelajaran 2004/2005, bahkan sebelum terbitnya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Sekolah ini memiliki 211 peserta didik yang dibimbing oleh 9 guru profesional, serta menampung 27 siswa berkebutuhan khusus dengan berbagai kategori. Selama perjalanannya, SDN 1 Tanjung tidak hanya menjalankan fungsi sebagai sekolah inklusi, tetapi juga telah menjadi sekolah rujukan yang sering menerima kunjungan studi banding, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk kunjungan akademisi dari Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut memiliki praktik pendidikan inklusi yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

Meskipun demikian, kajian ilmiah yang secara khusus menganalisis implementasi indeks inklusi di SDN 1 Tanjung masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji sejauh mana penerapan indeks inklusi ditinjau dari dimensi budaya, kebijakan, dan praktik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi indeks inklusi di SDN 1 Tanjung ditinjau dari dimensi budaya, kebijakan, dan praktik inklusi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi indeks inklusi di SDN 1 Tanjung secara komprehensif, serta mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pengembangannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mengungkap dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena implementasi indeks inklusi di SDN 1 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekolah ini dipilih secara purposif karena

statusnya sebagai Sekolah Dasar Rintisan Inklusi yang telah beroperasi lebih dari dua dekade, memiliki struktur organisasi inklusi yang terformalisasi, serta pernah menjadi sekolah rujukan bagi lembaga pendidikan lain. Subjek penelitian adalah Ibu Yulian Donor Setia, S.Psi., S.Pd., selaku Manager Inklusi SDN 1 Tanjung, yang dipilih berdasarkan peran strategisnya dalam pengelolaan program inklusi sekolah.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif yang dilakukan sebanyak dua kali, meliputi pemetaan kondisi fisik sekolah, interaksi peserta didik, proses pembelajaran di kelas inklusi, pengelolaan ABK oleh GPK, serta aktivitas ekstrakurikuler. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Manager Inklusi menggunakan panduan instrumen terstruktur yang mencakup empat domain manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga, studi dokumentasi dan kajian literatur, mencakup dokumen internal sekolah seperti SK penetapan sekolah inklusi, struktur organisasi, data peserta didik berkebutuhan khusus yang diperkuat dengan data sekunder

dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku referensi yang relevan dengan pendidikan inklusi.

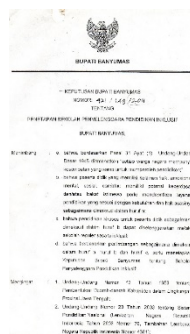
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum SD Negeri 1 Tanjung

SD Negeri 1 Tanjung merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berlokasi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah daerah, sekolah ini berkewajiban melaksanakan seluruh kebijakan pendidikan nasional, termasuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Saat ini, SDN 1 Tanjung memiliki 239 peserta didik yang dibimbing oleh 17 tenaga pendidik profesional dan 2 Guru pendamping khusus.

Sekolah ini telah menyelenggarakan pendidikan inklusi sejak tahun pelajaran 2004/2005, jauh mendahului terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan

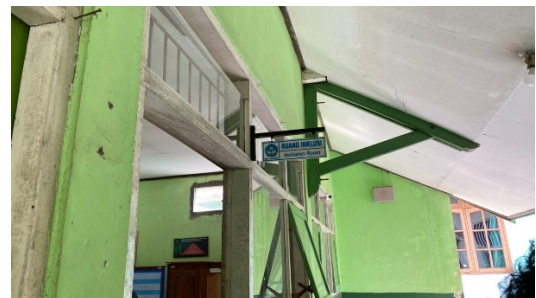
Inklusif. Penunjukan sebagai SD Rintisan Inklusi menjadi awal dari komitmen kelembagaan yang terus berkembang, meski pada masa awal penyelenggaraannya sekolah masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana dan belum tersedianya guru berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Landasan hukum penyelenggaraan inklusi di sekolah ini kemudian diperkuat melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 421/149/2011.



Gambar 1. SK Penetapan SDN 1 Tanjung sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Di antara 239 peserta didik yang terdaftar, terdapat 27 siswa berkebutuhan khusus (ABK) yang tersebar di kelas 1 hingga 6, meliputi kategori tunarungu, tunagrahita, slow learner, ADHD, gangguan emosi, dan tunadaksa. Penentuan kategori ABK dilakukan melalui asesmen psikologi

yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan biro psikologi yang ditunjuk secara resmi. Prosedur ini selaras dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 4 yang menegaskan bahwa identifikasi dan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkualitas (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009). Agustin (2019) juga menegaskan bahwa proses identifikasi yang melibatkan tenaga ahli psikologi merupakan fondasi penting dalam merancang layanan pembelajaran yang tepat bagi setiap ABK di sekolah inklusi.



Gambar 2. Ruang Inklusi SDN 1 Tanjung

Komitmen kelembagaan yang kuat sejak awal ini selaras dengan temuan Tarnoto (2016) bahwa dukungan kebijakan pemerintah dan komitmen kepala sekolah merupakan

faktor kunci keberhasilan implementasi pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. Hal tersebut juga tercermin dari visi SDN 1 Tanjung, yaitu “Mewujudkan pelayanan pendidikan inklusi menuju prestasi ABK yang optimal dalam keterbatasan.” Visi ini dijabarkan melalui tiga tujuan utama: (1) mengarahkan perilaku ABK agar memahami norma di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat; (2) membantu ABK belajar mengontrol emosi melalui pemodelan perilaku positif dari siswa reguler; serta (3) mengembangkan kualitas komunikasi, interaksi, dan adaptasi ABK dalam komunitas sekolah yang beragam.

Keterlibatan berbagai pihak turut memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN 1 Tanjung. Keluarga dilibatkan melalui paguyuban wali murid dan kegiatan outing class, sementara instansi terkait seperti kelurahan, puskesmas kecamatan, dan kepolisian sektor turut mendukung pelaksanaan pembelajaran.



Gambar 3. Kunjungan Studi Banding Akademisi Filipina ke SDN 1 Tanjung

Kerja sama lintas sektor ini juga dilakukan dalam penentuan karakteristik dan penanganan ABK. Pola keterlibatan multipihak ini sesuai dengan prinsip evolving inclusive practices dalam Index for Inclusion yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam membangun praktik inklusi yang berkelanjutan (Booth & Ainscow, 2002). Komitmen ini menjadikan SDN 1 Tanjung sebagai sekolah rujukan yang kerap menerima kunjungan studi banding dari berbagai lembaga, termasuk akademisi dari Filipina dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang menegaskan bahwa praktik pendidikan inklusi di sekolah ini memiliki nilai yang layak untuk dikaji lebih mendalam.

Budaya Inklusif di SD 1 Tanjung

Penelitian di SDN 1 Tanjung menunjukkan bahwa pendidikan inklusi telah diterima dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Sikap penerimaan tersebut tercermin dari interaksi sehari-hari yang menunjukkan rasa saling menghargai antara siswa reguler dan siswa ABK, tanpa ditemukan perlakuan diskriminatif maupun pengucilan selama proses pembelajaran maupun kegiatan di luar kelas. Di dalam kelas, guru tidak sekadar menyampaikan materi akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial agar peserta didik reguler mampu menghormati dan menghargai keberagaman. Pemahaman bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan mendorong siswa reguler untuk menerima keberadaan siswa ABK sebagai bagian dari teman belajar yang memiliki hak yang sama.

Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa reguler kerap membantu siswa ABK ketika mengalami kesulitan, sementara siswa ABK diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok maupun aktivitas sekolah lainnya. Kondisi ini mencerminkan hubungan sosial yang harmonis dan

lingkungan belajar yang kondusif. Budaya toleransi, empati, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman yang berkembang di SDN 1 Tanjung menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi, karena siswa ABK tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga secara sosial dan emosional.

Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya dimensi *creating inclusive cultures* dalam *Index for Inclusion* yang dikembangkan Booth dan Ainscow (2002), yang menekankan pentingnya membangun komunitas sekolah yang saling menghargai, aman, dan menerima keberagaman sebagai fondasi utama pendidikan inklusif. Pemahaman tentang inklusivitas secara terprogram ditanamkan melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada setiap awal tahun ajaran, sehingga seluruh siswa baru belajar memahami dan menghargai perbedaan sejak dini. Sulistyaningsih (2018) dalam penelitiannya pada sekolah inklusi menemukan bahwa indikator “semua orang merasa diterima” dan “staf saling berkolaborasi” merupakan kelebihan utama dimensi budaya inklusif yang

terpenuhi di sekolah-sekolah inklusi yang berkomitmen tinggi.

Lingkungan yang menerima keberadaan siswa ABK turut meningkatkan rasa percaya diri, motivasi belajar, dan kemampuan bersosialisasi mereka. Maka dari itu, budaya sekolah yang berkembang di SDN 1 Tanjung telah mendukung implementasi pendidikan inklusi secara menyeluruh dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, adil, dan menghargai keberagaman peserta didik.

Kebijakan Inklusif di SD 1 Tanjung

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa SDN 1 Tanjung telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif secara resmi. Sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah rintisan inklusi sejak tahun ajaran 2004–2005 dengan dasar hukum berupa Keputusan Bupati No. 421/149/2011 serta mengacu pada Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Adanya legalitas tersebut menandakan bahwa sekolah telah memenuhi salah satu indikator penting penyelenggaraan inklusi, yaitu memiliki aturan yang jelas dalam memberikan layanan

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam praktiknya, sekolah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang setara dengan menempatkan siswa reguler dan siswa ABK dalam kelas yang sama tanpa pemisahan, sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Nilai toleransi dan sikap saling menghargai juga ditanamkan melalui kegiatan MPLS serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, sekolah menyediakan sejumlah program khusus, meliputi pelatihan guru pendamping khusus, pelatihan penanganan siswa inklusi bagi seluruh guru kelas dan tenaga kependidikan, serta penyesuaian modul ajar sesuai kebutuhan siswa. Program-program ini mencerminkan upaya sekolah dalam meningkatkan kemampuan tenaga pendidik agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah juga telah memiliki Guru Pendamping

Khusus (GPK) yang berperan mendampingi dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa ABK di kelas. Keberadaan GPK ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa sekolah telah memenuhi komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terstandar.

Meskipun pada awal pelaksanaannya sekolah menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana dan belum tersedianya guru PLB, sekolah terus melakukan pengembangan melalui workshop, seminar, pelatihan, dan studi banding secara konsisten. Sekolah juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, puskesmas, dan biro psikologi untuk melakukan asesmen terhadap siswa berkebutuhan khusus, sehingga layanan pendidikan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan standar pendidikan inklusi yang menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dalam menunjang perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.

Secara umum, SDN 1 Tanjung telah menerapkan pendidikan inklusif dengan baik, ditandai dengan adanya

kebijakan resmi, program pendukung yang terstruktur, tenaga pendamping khusus, serta lingkungan belajar yang tidak diskriminatif. Komitmen sekolah dalam terus meningkatkan kualitas layanan inklusi terbukti dari pengakuan berbagai pihak, di mana sekolah ini bahkan telah menjadi tempat studi banding bagi lembaga pendidikan lain, termasuk kunjungan dari akademisi luar negeri, yang ingin mempelajari praktik pelaksanaan pendidikan inklusi secara langsung.



Gambar 4. Workshop Penguatan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusif

Praktik Pembelajaran Inklusif

Praktik pembelajaran inklusif di SDN 1 Tanjung menunjukkan adanya upaya sekolah dalam mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik, baik siswa reguler maupun ABK. Berdasarkan hasil

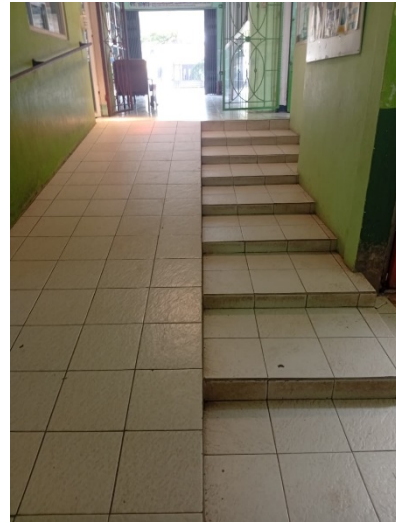
wawancara dan observasi, proses pembelajaran dilakukan tanpa pemisahan antara kelas inklusi dan non-inklusi; semua siswa belajar bersama dalam satu ruang kelas dengan penyesuaian pembelajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan bersama peserta didik lainnya. Sekolah menyediakan GPK yang bertugas membantu proses pembelajaran siswa inklusi agar dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal, terutama bagi siswa dengan kategori tunarungu, tunagrahita, slow learner, ADHD, gangguan emosi, dan tunadaksa.

Dalam aspek kurikulum, sekolah melakukan adaptasi melalui penyesuaian modul ajar sebagai salah satu program kerja pendukung pendidikan inklusi. Penyesuaian ini merupakan bentuk diferensiasi pembelajaran sebagaimana dikemukakan Tomlinson (2001), yang menekankan pentingnya penyesuaian konten, proses, produk, dan lingkungan belajar berdasarkan

kesiapan, minat, serta profil belajar siswa. Guru telah melakukan diferensiasi proses melalui pendampingan khusus sehingga siswa tidak dipaksa mencapai target yang seragam. Adapun sistem evaluasi tetap menggunakan standar yang sama dengan siswa reguler, namun dilengkapi dengan laporan perkembangan aspek kognitif, sosial, emosi, dan motorik bagi siswa ABK. Meskipun langkah ini mencerminkan upaya evaluasi yang autentik, diferensiasi penilaian idealnya perlu dikembangkan lebih fleksibel sesuai karakteristik hambatan belajar masing-masing siswa (Agustin, 2019).

Dalam aspek media dan fasilitas, sekolah telah menyediakan ruang khusus bagi siswa difabel serta memanfaatkan media edukatif seperti puzzle huruf dan angka yang digunakan bersama antara siswa reguler dan siswa ABK untuk meningkatkan kemampuan kognitif, komunikasi, dan interaksi sosial. Penggunaan media manipulatif ini sejalan dengan teori konstruktivistik yang menekankan pemahaman konsep melalui pengalaman langsung dan aktivitas bermakna. Sekolah juga menyediakan fasilitas aksesibilitas

fisik seperti jalur khusus bagi pengguna kursi roda, yang mencerminkan penerapan prinsip Universal Design for Learning (UDL) dalam menciptakan lingkungan belajar yang setara dan ramah difabel. Kusumastuti dan Prabawati (2024) menyatakan bahwa penerapan UDL di sekolah dasar memastikan semua siswa, terlepas dari kemampuan atau latar belakang mereka, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.



Gambar 6. Fasilitas Aksesibilitas bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus



Gambar 5. Pendampingan Pembelajaran Siswa ABK melalui Media Edukatif

Praktik pembelajaran inklusif di SDN 1 Tanjung juga tercermin dari budaya sekolah yang tidak diskriminatif, di mana siswa reguler mampu menghargai dan bekerja sama dengan siswa ABK tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan belajar. Pemahaman inklusivitas ditanamkan melalui kegiatan MPLS dan pembiasaan sehari-hari. Secara keseluruhan, implementasi pembelajaran inklusif di sekolah ini sudah berjalan dengan baik, ditandai oleh pembelajaran bersama tanpa diskriminasi, adaptasi modul ajar, keberadaan GPK, serta pelatihan guru yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pengembangan media pembelajaran khusus ABK, diferensiasi evaluasi yang lebih fleksibel, dan penguatan kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran individual.

Praktik pembelajaran inklusif di SDN 1 Tanjung tidak dapat dilepaskan dari kerangka konseptual integrasi yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu integrasi fisik, integrasi sosial, dan integrasi pembelajaran. Integrasi fisik merujuk pada penempatan ABK dalam lingkungan sekolah yang sama dengan siswa reguler, termasuk penggunaan ruang kelas, fasilitas, dan sarana prasarana secara bersama-sama. Menurut Latifah (2020), keterpaduan pada tingkat fisik berarti anak berkebutuhan khusus dapat dipadukan untuk kegiatan yang bersifat non-akademik, seperti olahraga, keterampilan, dan sosialisasi pada saat waktu istirahat.

Di SDN 1 Tanjung, integrasi fisik terwujud melalui penyediaan jalur aksesibel bagi pengguna kursi roda serta ruang khusus bagi siswa difabel yang memungkinkan mereka hadir dan berpartisipasi secara fisik dalam lingkungan sekolah reguler. Amaliani

menegaskan bahwa fasilitas fisik yang mendukung inklusi meliputi aksesibilitas bangunan sekolah seperti jalur landai, pegangan tangan, toilet ramah disabilitas, serta ruang kelas yang didesain agar menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung interaksi sosial (Amaliani et al., 2024). Keberadaan fasilitas ini merupakan prasyarat dasar agar inklusi tidak sekadar menjadi wacana, melainkan terwujud secara nyata dalam keseharian aktivitas sekolah.

Dimensi kedua, yaitu integrasi sosial, berkaitan erat dengan terbangunnya hubungan interpersonal yang positif antara siswa ABK dan siswa reguler di lingkungan sekolah. Azis, Mukramin, dan Risfaisal (2021) dalam penelitiannya di sekolah inklusi Kota Makassar menemukan bahwa interaksi bersifat asosiatif terjadi ketika interaksi mampu mempererat hubungan siswa ABK dan siswa non-ABK, sementara pemahaman negatif terhadap kondisi ABK justru mendorong terbentuknya interaksi disosiatif yang berpotensi memunculkan eksklusivitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman positif siswa reguler terhadap kondisi ABK menjadi kunci utama keberhasilan

integrasi sosial di sekolah inklusi. Di SDN 1 Tanjung, integrasi sosial tercermin dari budaya sekolah yang tidak diskriminatif, di mana pemahaman inklusivitas ditanamkan sejak awal melalui kegiatan MPLS dan pembiasaan harian yang terstruktur. Kondisi ini sejalan dengan temuan Irawati dan Winario (2020) bahwa pendidikan inklusi memiliki dampak positif dalam meningkatkan partisipasi ABK, membangun empati sosial, serta mengurangi stereotip negatif terhadap keberagaman, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih harmonis dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik

Dimensi ketiga, yaitu integrasi pembelajaran, merupakan aspek yang paling kompleks karena menuntut penyesuaian kurikulum, metode, dan evaluasi agar seluruh siswa baik reguler maupun ABK dapat belajar secara bermakna dalam satu setting kelas yang sama. UNESCO menyatakan bahwa sekolah inklusi tidak hanya memberikan akses langsung ke kelas bagi ABK, tetapi juga perlu membangun kebijakan, kurikulum, dan dukungan sosial-emosional yang responsif terhadap berbagai jenis tantangan belajar

(Supriyadi, 2022). Dalam konteks SDN 1 Tanjung, integrasi pembelajaran diwujudkan melalui adaptasi modul ajar, pendampingan oleh GPK, serta penggunaan media edukatif manipulatif yang digunakan bersama antara siswa reguler dan ABK. Pembelajaran bagi ABK hendaknya disusun secara khusus dengan mengkaji kemampuan siswa berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang mencakup tiga bidang yaitu afektif, fisik, dan akademik, sehingga setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya (Putri et al., 2024). Integrasi pembelajaran yang efektif dengan demikian mensyaratkan tidak hanya kehadiran fisik ABK di kelas reguler, tetapi juga keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar yang dirancang secara adaptif sesuai kapasitas masing-masing.

Ketiga dimensi integrasi fisik, sosial, dan pembelajaran saling menopang dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang berkualitas. Pendidikan inklusi membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan segregasi ke integrasi semua siswa dalam sistem pendidikan

yang sama, dengan komitmen bersama dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan Masyarakat (Ramadani et al., 2024). Tanpa integrasi fisik yang memadai, ABK tidak dapat mengakses sekolah secara setara; tanpa integrasi sosial, mereka rentan mengalami isolasi meskipun secara fisik hadir di kelas yang sama; dan tanpa integrasi pembelajaran, kehadiran mereka tidak menghasilkan perkembangan yang optimal. Widiastuti (2019) dalam jurnal Latifah (2020) mengingatkan bahwa anak difabel memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Dengan memperkuat sinergi antara ketiga dimensi integrasi tersebut secara bersamaan, SDN 1 Tanjung berpotensi menjadi model penyelenggaraan pendidikan inklusi yang komprehensif, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

Keterbatasan dan Rekomendasi

Pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 1 Tanjung secara umum sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah

keterbatasan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung bagi ABK menjadi hambatan yang paling terlihat. Sekolah masih memerlukan media pembelajaran yang lebih variatif dan lengkap agar kebutuhan belajar ABK dapat terpenuhi secara maksimal. Kedua, jumlah GPK yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pendampingan 27 siswa ABK dengan enam kategori berbeda, sehingga guru kelas harus turut menangani keberagaman kebutuhan tersebut. Perbedaan karakteristik setiap ABK, mulai dari tunarungu hingga tunadaksa, menuntut pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda dan menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik di lapangan.

Ketiga, tidak semua guru memiliki kompetensi yang setara dalam menangani ABK. Keterbatasan struktural ini juga ditemukan dalam penelitian Marisana dan Herawati (2023) yang menemukan bahwa kompetensi guru merupakan faktor penentu utama dalam kualitas proses pembelajaran inklusi di sekolah dasar. Keempat, implementasi kebijakan inklusi masih membutuhkan banyak

penyesuaian, terutama dalam kemampuan guru mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan merancang pembelajaran yang benar-benar berdiferensiasi, bukan sekadar menempatkan ABK dalam kelas yang sama.

Terhadap berbagai keterbatasan tersebut, sekolah telah melakukan sejumlah upaya yang patut diapresiasi. Sekolah secara rutin mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan studi banding mengenai pendidikan inklusi, baik di tingkat sekolah, kabupaten, maupun provinsi, secara daring dan luring. Penyesuaian modul ajar dilakukan agar materi lebih mudah dipahami sesuai kemampuan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler, sekolah berupaya memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh siswa tanpa perlakuan yang membedakan.

Kedepan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di SDN 1 Tanjung. (1) Peningkatan fasilitas dan media pembelajaran khusus ABK yang lebih variatif dan sesuai kebutuhan masing-masing kategori perlu segera diprioritaskan. (2) Penambahan

jumlah GPK sangat diperlukan agar proses pendampingan berjalan lebih optimal dan proporsional. (3) Pelatihan guru perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan penekanan pada diferensiasi penilaian dan strategi pembelajaran individual. (4) Kerja sama dengan Dinas Pendidikan, biro psikologi, puskesmas, orang tua, dan masyarakat perlu terus diperkuat. (5) Evaluasi program dilaksanakan secara rutin dan berbasis data perkembangan siswa agar sekolah dapat mengidentifikasi kekurangan dan terus berkembang. Langkah-langkah ini sejalan dengan rekomendasi Tarnoto (2016) bahwa keberhasilan jangka panjang pendidikan inklusi mensyaratkan sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan dukungan kebijakan yang konsisten.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pendidikan inklusif di SDN 1 Tanjung telah berjalan dengan baik dan memenuhi tiga dimensi utama dalam *Index for Inclusion*, yaitu budaya inklusif, kebijakan inklusif, dan praktik inklusif.

Pada dimensi budaya, sekolah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang menerima keberagaman, ditandai dengan adanya sikap toleransi, empati, serta interaksi sosial yang harmonis antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus (ABK). Nilai-nilai inklusivitas ditanamkan melalui pembiasaan sehari-hari dan kegiatan sekolah sehingga tercipta suasana pendidikan yang ramah dan tidak diskriminatif.

Pada dimensi kebijakan, SDN 1 Tanjung telah memiliki legalitas resmi sebagai sekolah inklusi, didukung program kerja yang terstruktur, keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, biro psikologi, puskesmas, dan orang tua siswa. Sementara itu, pada dimensi praktik, sekolah telah menerapkan pembelajaran bersama tanpa pemisahan kelas dengan penyesuaian modul ajar, pendampingan khusus, dan evaluasi perkembangan siswa secara menyeluruh.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas pembelajaran khusus ABK, jumlah GPK yang belum memadai, serta kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.

Oleh karena itu, peningkatan sarana prasarana, penguatan kompetensi guru, penambahan GPK, dan evaluasi program secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 1 Tanjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2019). Penerapan identifikasi, asesmen, dan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi. *Edustream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 72–80.
- Ahmadi, A., Hanifah, M., & Herawati, N. I. (2022). Rancangan program sekolah inklusi di Sekolah Dasar Negeri 159 Sekejati Kota Bandung. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 2251–2265.
- Amaliani, R., Yunitasari, S. E., Fajriah, D., Salmiani, S., & Gustini, E. (2024). Sarana dan prasarana sekolah inklusi: Kunci sukses pendidikan inklusi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10(1), 361–366.
- Azis, F., & Risfaisal, R. (2021). Interaksi sosial anak autisme di sekolah inklusi (studi sosiologi pada sekolah inklusi di Kota Makassar). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 77–85. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4365>
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion: Developing learning*

- and participation in schools.* Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Jauhari, M. N. (2017). Pengembangan sekolah inklusif dengan menggunakan instrumen Index for Inclusion. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 13(23), 18–27.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa*. Depdiknas.
- Kusumastuti, G., & Prabawati, W. (2024). Pemahaman guru sekolah dasar terhadap Universal Design for Learning sebagai strategi belajar yang mendukung pendidikan inklusif. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 8(1), 277–289.
- Latifah, I. (2020). Pendidikan segregasi, mainstreaming, integrasi dan inklusi, apa bedanya? *Jurnal Pendidikan*, 29(2), 101–108.
- Marisana, D., & Herawati, N. I. (2023). Pengaruh kompetensi guru dalam proses pembelajaran inklusi di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3).
- Mulyani, M., Azzahro, F., Nisa, K. A., Pertiwi, P., & Ayu, R. (2025). Peran sekolah inklusi dalam menyiapkan keterampilan anak berkebutuhan khusus untuk menghadapi dunia kerja. *Jurnal Fokus Konseling*, 11(2), 232–242.
- Pertiwi, E. P., Ali, A. Z., & Sartinah, E. P. (2025). Filosofi dan prinsip dasar pendidikan inklusi: Implikasi terhadap masalah sosial masyarakat. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 329–346.
- Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: Tanggapan terhadap tantangan ke depannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2).
- Putri, S. A., Julita, F. F., Sari, R. R., Fitri, D. Y. A., & Wismanto, W. (2024). Metode pengajaran kreatif dalam pendidikan inklusi di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 127–134.
- Ramadani, H., Hakim, M. S., Ayunda, Z., & Mustika, D. (2024). Optimalisasi pendidikan inklusi di sekolah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 1–14. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.479>
- Sulistiyaningsih, R. (2018). Analisis penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan Index for Inclusion (studi kasus pada SD YBPK Semampir Kota Kediri). *Happiness: Journal of Psychology and Islamic Science*, 2(2), 67–81.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *Humanitas*, 13(1), 50–61.
- Tomlinson, C. A. (2001). *How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms*. ASCD.
- Yulianto, T. (2018). Pendidikan inklusif: Konsep dasar, ruang lingkup, dan pembelajaran. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 195–206.